

ABSTRAK

Kabupaten Kebumen adalah kabupaten yang tidak jarang terjadi kasus kekerasan seksual. Data Unit PPA Polres Kebumen dari tahun 2022-2024(Jan-Feb) terdapat 67 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan terhadap korban penting karena korban mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Namun fakta yang terjadi dalam praktiknya pemberian perlindungan masih terdapat hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Kebumen berserta faktor penghambatnya. Penelitian ini memakai metode pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara terhadap Unit PPA Polres Kebumen dan P2TP2A Kartika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Unit PPA Polres Kebumen melakukan upaya pre-emptif, preventif, dan upaya represif. Selain itu, Unit PPA Polres Kebumen bekerja sama dengan P2TP2A Kartika memberikan bantuan hukum, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial, serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Adapun penghambat dalam memberikan perlindungan dari faktor struktur hukum atau sarana fasilitas karena Unit PPA Polres Kebumen belum didukung kendaraan khusus dan jauhnya Pusat Laboratorium Forensik. Sedangkan P2TP2A Kartika kekurangan Sumber Daya Manusia dan anggaran. Selain itu karena faktor kultur hukum yaitu kurangnya kesadaran korban dan/atau keluarganya untuk melapor dan masih menganggap bahwa kekerasan seksual merupakan hal yang aib.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; anak korban; kekerasan seksual.

ABSTRACT

Kebumen Regency is a district where cases of sexual violence are not uncommon. Data from the Kebumen Police PPA Unit from 2022-2024 (Jan-Feb) there were 67 cases of sexual violence against children. Protection for victims is important because victims experience physical, psychological and social suffering. However, in practice the providing of protection still has obstacles. This research aims to determine legal protection for child victims of sexual violence in Kebumen Regency and the inhibiting factors. This research uses a sociological juridical approach by conducting interviews with the Kebumen Police PPA Unit and P2TP2A Kartika. The research results show that legal protection for child victims of sexual violence in Kebumen Regency has been implemented based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The Kebumen Police PPA Unit carried out preemptive, preventive, and repressive efforts. Apart from that, the Kebumen Police PPA Unit collaborates with P2TP2A Kartika to provide legal assistance, social rehabilitation, psychosocial assistance, provision of social assistance, as well as providing protection and assistance in every judicial process. The obstacles in providing protection from legal structure factors or facilities are because the Kebumen Police PPA Unit is not yet supported by special vehicles and the Forensic Laboratory Center is far away. Meanwhile, P2TP2A Kartika lacks human resources and budget. Apart from that, it is due to legal culture factors, namely the lack of awareness of victims and/or their families to report and still considering that sexual violence is a shame.

Keywords: *Legal protection; child victims; sexual violence.*

